PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

2025

RENJA PERUBAHAN

Rencana Kerja Perubahan

Badan Kesatuan Bangsa & Politik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta sebagai respons terhadap dinamika perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. RENJA Perubahan ini juga menjadi acuan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran, guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2020–2025. Dokumen ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester I Tahun Anggaran 2025, serta masukan dari berbagai pihak terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga RENJA Perubahan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat kehidupan demokrasi yang sehat di Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 24 Oktober 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nunukan

HASAN BASRI, S. IP
Pembina TK. I/IVb
NIP 197310052005021003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4
1.1. LATAR BELAKANG 4
1.2 LANDASAN HUKUM 5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.4. RUANG LINGKUP 6
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 8
2.1. PROFIL OPD 8
2.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU (REVIEW KINERJA TAHUN SEBELUMNYA) 9
2.3. REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAEARAH DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III 18
2.4. ISU-ISU STRATEGIS YANG MENDASARI PERUBAHAN 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN 22
3.1. TUJUAN 22
3.2. SASARAN 23
3.3 SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 24

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025 26
4.1. RENCANA KERJA OPD 26
4.2. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 26
4.3. PENAMABAHAN/PENGURANGAN/HAPUS KEGIATAN 31

BAB V PENUTUP 39
5.1. KESIMPULAN 39
5.2 REKOMENDASI 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah, setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib menyusun dokumen perencanaan tahunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi terkini, perubahan kebijakan strategis, serta kebutuhan aktual dalam rangka mendukung stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga harmoni sosial, ketahanan ideologi, serta kewaspadaan terhadap potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika sosial-politik yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun lokal, serta tantangan global seperti radikalisme, intoleransi, disinformasi, dan konflik horizontal, menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan untuk senantiasa adaptif, proaktif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Perubahan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebelumnya, hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan, serta perubahan kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025. Penyusunan Renja Perubahan ini juga mempertimbangkan arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait penguatan moderasi beragama, pembinaan wawasan kebangsaan, pengelolaan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat yang sehat dan demokratis.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloalan Keuangan Dareah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 37);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan adalah untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran tahun berjalan dengan kondisi aktual, prioritas pembangunan terkini, serta perubahan kebijakan yang terjadi selama pelaksanaan program tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. Menjamin keselarasan antara rencana kerja dengan kebutuhan riil di lapangan;
2. Mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya menjaga stabilitas politik dan persatuan bangsa;
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2025 meliputi seluruh program dan kegiatan yang mengalami perubahan sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan daerah, dinamika pelaksanaan anggaran, serta kebutuhan mendesak yang muncul selama tahun berjalan. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian pagu anggaran, pergeseran alokasi kegiatan, penambahan atau pengurangan kegiatan baru, serta revisi terhadap indikator kinerja dan target capaian.

Secara spesifik, perubahan Renja OPD Tahun 2025 mencakup:

1. Penyesuaian anggaran pada sejumlah kegiatan prioritas sebagai respons terhadap hasil evaluasi pelaksanaan semester I Tahun 2025 dan arahan kebijakan dalam KUA-PPAS Perubahan;
2. Pengalihan dana dari kegiatan yang mengalami kendala teknis atau realisasi rendah ke kegiatan yang lebih strategis dan mendesak;
3. Revisi target kinerja pada beberapa kegiatan yang terdampak oleh perubahan alokasi anggaran maupun faktor eksternal di luar kendali OPD.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun secara sistematis dan terstruktur agar memudahkan pemahaman, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistematika penulisan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Permendagri tentang tata cara perencanaan dan penganggaran daerah.

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Ruang Lingkup
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II – GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Profil OPD
2.2. Capaian Kinerja Tahun Lalu (Review Kinerja Tahun Sebelumnya)
2.3. Realisasi Anggaran Dan Belanja Daearah Dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Opd Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan Triwulan III
2.4. Isu-Isu Strategis Yang Mendasari Perubahan

BAB III – TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
3.3. Sasaran Strategis.

BAB IV – PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025

4.1. Rencana Kerja OPD
4.2.. Perubahan Program Kegiatan
4.3. Penambahan/Pengurangan/Hapus Kegiatan

BAB V – PENUTUP

- Kesimpulan
- Rekomendasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. PROFIL OPD

2.1.1. TUGAS POKOK

Bakesbangpol adalah perangkat daerah yang mempunyati tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

2..1.2. FUNGSI

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

wilayah Kabupaten Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
g. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa.

2.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU (REVIEW KINERJA TAHUN SEBELUMNYA)

Dalam upaya mewujudkan stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa, serta ketertiban sosial di wilayah perbatasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sepanjang Tahun Anggaran 2024. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi penting dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, mengingat posisi strategis Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan negara yang rentan terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan lintas batas.

Secara umum, pelaksanaan anggaran Tahun 2024 berjalan dengan baik, dengan realisasi anggaran mencapai sekitar 95.00% dari pagu yang ditetapkan. Capaian kinerja utama Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 meliputi :

- Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan di wilayah perbatasan, termasuk di Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebuku;
- Fasilitasi pengamanan Pemilu 2024 melalui koordinasi intensif dengan aparat keamanan, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu di Kabupaten Nunukan berlangsung aman, damai, dan tertib;
- Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai wadah sinergi dalam menjaga harmoni antarumat beragama dan mencegah penyebaran paham radikal;
- Pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, isu separatisme, serta penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan, khususnya di wilayah pulau-pulau terluar;
- Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis intelijen sosial-politik dan manajemen konflik, guna memperkuat respons cepat terhadap dinamika kebangsaan di wilayah perbatasan.

Berikut ini adalah tabel Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Triwulan ke IV.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA APBD II KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER)

URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
ORGANISASI : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANG : Hasan Basri, S.IP
I. Realisasi Fisik dan Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN Rp	BOBOT (%)	TARGET		REALISASI TARGET		TINGKAT CAPAIAN			SISA ANGGARAN (Rp)	LOKASI	PERMASALAHAN	PPTK
								FISIK (%)	KEU (Rp)	KEU (%)				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
I	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*													
1.	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*													
	1. *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	30.944.000,00	0,07	4	dokumen	4	Dokumen	100	30.820.650,00	99,60	123.350,00	Nunukan		Rasna. SS
	2. *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6.077.570,00	0,01	1	laporan	1	Laporan	100	5.941.740,00	97,77	135.830,00	Nunukan		Rasna. SS
2.	*Administrasi Keuangan Daerah*													
	1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.701.480.564,00	7,91	12	bulan	12	bulan	100,00	3.431.217.395	92,70	270.263.169,00	Nunukan		Rasna, SS
3.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*													
	1. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.646.600,00	0,01	6	paket	6,00	Paket	100,00	2.600.730	98,27	45.870,00	Nunukan		Rasna, SS
	2. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	13.499.640,00	0,03	3	paket	3,00	Paket	100,00	13.159.125	97,48	340.515,00	Nunukan		Rasna, SS
	3. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	41.666.020,00	0,09	12	paket	12,00	Paket	100,00	41.383.241	99,32	282.779,00	Nunukan		Rasna, SS
	4. *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	13.703.250,00	0,03	12	paket	12,00	Paket	100,00	13.702.150	99,99	1.100,00	Nunukan		Rasna, SS
	5. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	155.701.600,00	0,33	4	laporan	4	laporan	100,00	151.036.357	97,00	4.665.243,00	Nunukan		Rasna, SS
4	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*													
	1 *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	208.094.906,00	0,44	17	unit	17	Unit	100,00	207.480.176,00	99,70	614.730,00	Nunukan		Rasna. SS
5.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*											Nunukan		
	1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.200.000,00	0,00	12	laporan	12	laporan	100,00	1.200.000,00	100,00	0,00	Nunukan		Rasna. SS
	2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	102.684.000,00	0,22	12	laporan	12	laporan	100,00	69.252.676,00	67,44	33.431.324,00	Nunukan		Rasna. SS
	3. *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	182.628.800,00	0,39	12	laporan	12	laporan	100,00	169.042.880,00	92,56	13.585.920,00	Nunukan		Rasna. SS
6.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*													
	1. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	61.370.100,00	0,13	12	unit	12	Unit	100,00	58.215.882,00	94,86	3.154.218,00	Nunukan		Rasna. SS
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	360.000.000,00	0,77	4	unit	4	Unit	100,00	355.511.851,00	98,75	4.488.149,00	Nunukan		Rasna. SS

	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.970.000,00	0,21	12	unit	12	Unit	100,00	91.925.700,00	91,95	8.044.300,00	Nunukan		Rasna. SS
II	***PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN***													
1.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter***													
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.136.331.600,00	2,43	150	orang	150	orang	100,00	1.088.073.733	95,75	48.257.867	Kab. Nunukan		Emiliana Nata Koten. L, SH
III	***PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK***													
1.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***													
	1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	38.322.273.107,00	81,86	100	dokumen	100	Dokumen	100,00	38.257.395.411,00	99,83	64.877.696	Kab. Nunukan		Nurmiati, S. IP
IV	***PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN***													
1.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***													
	1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	84.787.190,00	0,18	50	orang	50	orang	100	68.542.909,00	81	16.244.281	Kab. Nunukan		Nurmiati, S. IP
V	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA***													
1.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***													
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	722.490.365,00	1,54	250	orang	250	orang	100,00	709.299.014,00	98,17	13.191.351	Kab. Nunukan		Abdul Salam, S. Sos

VI	***PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL***												
1.	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***												
	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	613.313.590,00	1,31	7	orang	7	orang	100,00	284.394.696,00	46,37	328.918.894,00	Kab. Nunukan		Widodo, S. PKP, M. Si
	2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	953.749.960,00	2,04	6	dokumen	6	dokumen	0,00	810.521.916,00	84,98	143.228.044	Kab. Nunukan		Widodo, S. PKP, M. Si
	TOTAL	**46.814.612.862**	**100**	**RATA-RATA CAPAIAN FISIK DAN KEUANGAN**				**95,00**	**45.860.718.232**	**92,06**	**953.894.630**			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nunukan telah melaksanakan sejumlah program dan kegiatan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah, penguatan ideologi, peningkatan peran partai politik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ketahanan sosial, serta peningkatan kewaspadaan nasional. Secara keseluruhan, realisasi fisik mencapai rata-rata 95%, sementara realisasi keuangan mencapai 92,06% dari total pagu anggaran sebesar Rp 46.814.612.862..

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini merupakan tulang punggung operasional pemerintahan daerah, mencakup perencanaan, administrasi keuangan, penyediaan sarana prasarana, dan jasa penunjang.

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah (4 dokumen) dan koordinasi laporan capaian kinerja SKPD (1 laporan) telah terealisasi 100% secara fisik dan keuangan, menunjukkan efisiensi dalam proses perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

- Administrasi Keuangan Daerah :
  Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 3.701.480.564,00 tercapai 100% secara fisik, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.431.217.395,00 (92,70%). Ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji ASN berjalan lancar meskipun terdapat sedikit selisih anggaran.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  Semua kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik, peralatan rumah tangga, logistik kantor, barang cetakan, hingga rapat koordinasi dan konsultasi SKPD telah terealisasi 100% secara fisik. Realisasi keuangan untuk kelompok kegiatan ini sangat tinggi, mencapai rata-rata di atas 97%, dengan total realisasi Rp 151.036.357,00 dari pagu Rp 155.701.600,00.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp 208.094.906,00 terealisasi 100% secara fisik dan keuangan, dengan nilai realisasi Rp 207.480.176,00 (99,70%).

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  Penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, dan pelayanan umum kantor telah terealisasi sempurna (100%) baik secara fisik maupun keuangan. Total realisasi keuangan mencapai Rp 341.345.548,00 dari pagu Rp 347.510.800,00.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
  Pemeliharaan pajak, perizinan kendaraan dinas (Rp 61.370.100,00) dan rehabilitasi gedung kantor (Rp 360.000.000,00) juga terealisasi 100% secara fisik, dengan realisasi keuangan masing-masing 94,86% dan 98,75%.

II. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program ini bertujuan membentuk wawasan kebangsaan dan karakter bangsa melalui pendidikan ideologi.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan :
  Kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi 150 orang peserta (termasuk bela negara, karakter bangsa, dan bineka tunggal ika) telah terealisasi 100% secara fisik. Realisasi keuangan mencapai Rp 1.088.073.733,00 dari pagu Rp 1.136.331.600,00 (95,75%), menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program pembentukan karakter.

III. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**
Program ini fokus pada penguatan demokrasi dan etika politik.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, dan Peningkatan Demokrasi :
  Kegiatan pelatihan dan fasilitasi bagi 100 orang peserta telah terealisasi 100% secara fisik. Realisasi keuangan mencapai Rp 38.257.395.411,00 dari pagu Rp 38.322.273.107,00 (99,83%), menunjukkan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi.

IV. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
Program ini bertujuan memperkuat peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas dan Pengawasan :
  Kegiatan pendaftaran, pembinaan, evaluasi, dan mediasi 50 orang peserta telah terealisasi 100% secara fisik. Realisasi keuangan mencapai Rp 68.542.909,00 dari pagu Rp 84.787.190,00 (81%), menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

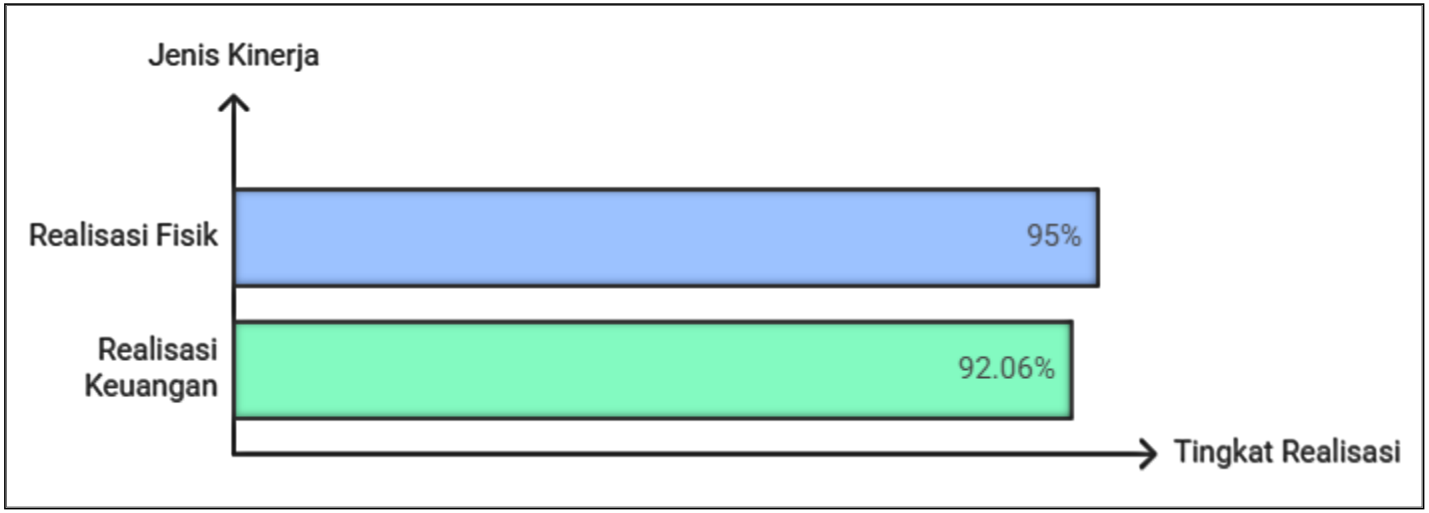
V. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**
Program ini bertujuan menciptakan ketahanan masyarakat melalui pencegahan masalah sosial.

- Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama :
  Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kerukunan bagi 250 orang peserta telah terealisasi 100% secara fisik. Realisasi keuangan mencapai Rp 709.299.014,00 dari pagu Rp 722.490.365,00 (98,17%), menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan.

VI. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
Program ini bertujuan meningkatkan kewaspadaan nasional dan menyelesaikan konflik sosial.

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial :
- Kegiatan fasilitasi kewaspadaan nasional bagi 7 orang peserta telah terealisasi 100% secara fisik, dengan realisasi keuangan Rp 284.394.696,00 dari pagu Rp 613.313.590,00 (46,37%). Rendahnya realisasi keuangan menunjukkan adanya efisiensi besar atau potensi *carry over* ke tahun berikutnya.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota :
  Kegiatan forum koordinasi yang menghasilkan 6 dokumen telah terealisasi 100% secara fisik, namun realisasi keuangannya nol (0,00%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran langsung, mungkin karena didanai dari sumber lain atau bersifat non-belanja.

Grafik
Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan
Tahun 2024



Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV TA 2024 di Kabupaten Nunukan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi fisik rata-rata 95% dan realisasi keuangan 92,06%. Beberapa program seperti administrasi umum, penguatan ideologi, dan pembinaan ketahanan sosial mencapai realisasi mendekati 100%. Meskipun ada beberapa kegiatan dengan realisasi keuangan lebih rendah (seperti forum koordinasi dan kewaspadaan nasional), hal ini tidak mengurangi pencapaian fisik yang optimal. Laporan ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan efisiensi anggaran di masa depan, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

No	Program	Rata - Rata Capaian Kinerja		Rata - Rata Capaian Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)
		Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat	
1	▸ PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100	ST	92,822	ST	1.088.073.733
2	▸ PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100	ST	82,797	T	38.257.395.411
3	▸ PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100	ST	63,735	R	68.542.909
4	▸ PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	SR	88,662	T	709.299.014
5	▸ PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100	ST	103,285	UNK	1.094.916.612
6	▸ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91,667	ST	112,018	UNK	3.853.506.225

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan enam program strategis yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program telah mencapai target dengan tingkat pencapaian yang sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi.

1. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

   Program ini menunjukkan capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi/ST), yang berarti seluruh kegiatan seperti pelatihan wawasan kebangsaan, bela negara, dan bineka tunggal ika telah terlaksana sesuai rencana. Secara keuangan, realisasi anggaran mencapai 92,822% (ST) atau sebesar Rp 1.088.073.733, menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Ini merupakan indikator kuat bahwa upaya penguatan identitas nasional di daerah telah berjalan optimal.

2. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

   Program ini juga mencatat capaian kinerja 100% (ST), mengindikasikan bahwa semua kegiatan pendidikan politik, fasilitasi demokrasi, dan penguatan etika politik telah terlaksana sempurna. Realisasi anggarannya mencapai 82,797% (Tinggi/T) atau Rp 38.257.395.411, yang menunjukkan bahwa meskipun ada efisiensi dalam pengeluaran, target kinerja tetap terpenuhi secara maksimal.

3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Dengan capaian kinerja 100% (ST), program ini berhasil melaksanakan pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan ormas secara menyeluruh. Namun, realisasi anggarannya hanya 63,735% (Rendah/R) atau Rp 68.542.909, yang mengindikasikan adanya efisiensi signifikan atau potensi *carry over* ke tahun depan. Meski demikian, pencapaian fisik yang sempurna menunjukkan bahwa output program tetap terwujud tanpa mengorbankan kualitas.

4. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

Program ini mencatat capaian kinerja 0% (Sangat Rendah/SR) — sebuah catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun realisasi anggarannya cukup tinggi (88,662% / T) atau Rp 709.299.014, tidak ada aktivitas fisik yang dilaporkan. Hal ini bisa disebabkan oleh penundaan kegiatan, kendala teknis, atau masalah administrasi. Perlu dilakukan evaluasi mendalam dan tindak lanjut cepat agar program ini tidak terbengkalai di triwulan berikutnya.

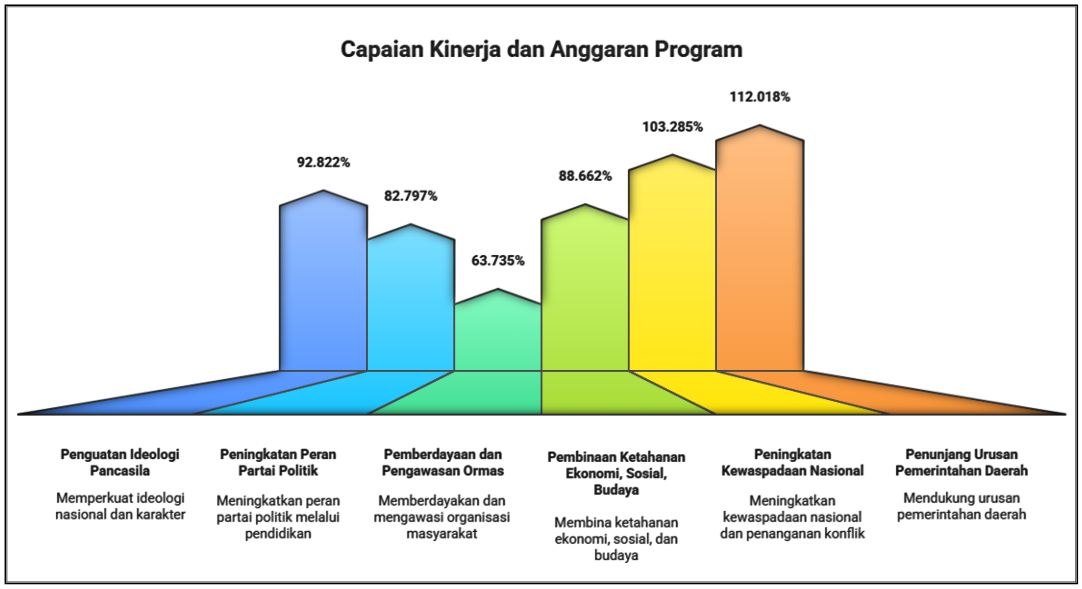
5. **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS SERTA FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

Program ini menunjukkan capaian kinerja 100% (ST), yang berarti kegiatan seperti kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, dan penanganan konflik sosial telah terlaksana secara optimal. Yang menarik, realisasi anggarannya justru melebihi pagu (103,285% / UNK – Untuk Kelebihan), yaitu Rp 1.094.916.612. Ini menunjukkan bahwa program ini mungkin memerlukan alokasi tambahan karena urgensi atau kompleksitas lapangan, namun tetap terkendali dan memberikan hasil nyata.

6. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini mencatat capaian kinerja 91,667% (ST), yang masih dalam kategori sangat baik. Realisasi anggarannya justru melebihi 100% (112,018% / UNK), mencapai Rp 3.853.506.225. Hal ini menunjukkan bahwa operasional pemerintahan daerah (termasuk administrasi, logistik, dan jasa) berjalan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan lapangan, meskipun memerlukan penyesuaian anggaran lebih lanjut.

Untuk lebih jelasnya capaian evaluasi Renja Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada grafik capaian dibawah ini.



2.3. REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DAEARAH DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN ANGGARAN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

Hasil pengukuran capaian pelaksanaan Realisasi Anggaran s/d Triwulan III dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3
LRA dan Belanja Daerah s/d Triwulan III (30 September)
Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	**BELANJA DAERAH**	**8.778.536.310,00**	**5.543.657.496,27**	**63,15**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.218.261.310,00**	**5.445.219.211,27**	**66,26**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.464.270.545,00	2.743.384.975,00	79,19
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.321.190.765,00	1.419.395.035,00	42,74
5.1.05	Belanja Hibah	1.432.800.000,00	1.282.439.201,27	89,51
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**8.218.261.310,00**	**5.445.219.211,27**	**66,26**
5.2	**BELANJA MODAL**	**560.275.000,00**	**98.438.285,00**	**17,57**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	560.275.000,00	98.438.285,00	17,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**560.275.000,00**	**98.438.285,00**	**17,57**
	JUMLAH BELANJA	**8.778.536.310,00**	**5.543.657.496,27**	**63,15**
	SURPLUS/DEFISIT	**(8.778.536.310,00)**	**(5.543.657.496,27)**	**63,15**

2.3.1. Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh belanja mencapai Rp8.778.536.310,00. Hingga periode pelaporan, realisasi belanja telah mencapai Rp5.543.657.496,27, atau sekitar 63,15% dari total anggaran yang direncanakan.

Realisasi tersebut terdiri dari dua komponen utama: Belanja Operasi dan Belanja Modal.

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi menyerap anggaran sebesar Rp8.218.261.310,00, dengan realisasi sebesar Rp5.445.219.211,27 (66,26%). Komponen ini terdiri dari :

   - Belanja Pegawai: Anggaran Rp3.464.270.545,00, realisasi Rp2.743.384.975,00 (79,19%). Realisasi tertinggi di antara semua sub-uraian, menunjukkan efisiensi dalam penyaluran gaji dan tunjangan.
   - Belanja Barang dan Jasa: Anggaran Rp3.321.190.765,00, realisasi Rp1.419.395.035,00 (42,74%). Realisasi masih relatif rendah, mungkin karena proyek atau kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
   - Belanja Hibah: Anggaran Rp1.432.800.000,00, realisasi Rp1.282.439.201,27 (89,51%). Realisasi sangat tinggi, menunjukkan penyaluran hibah telah berjalan sesuai rencana.

2. Belanja Modal

   Belanja modal dialokasikan sebesar Rp560.275.000,00, namun realisasinya baru mencapai Rp98.438.285,00 (17,57%). Hal ini didorong oleh :

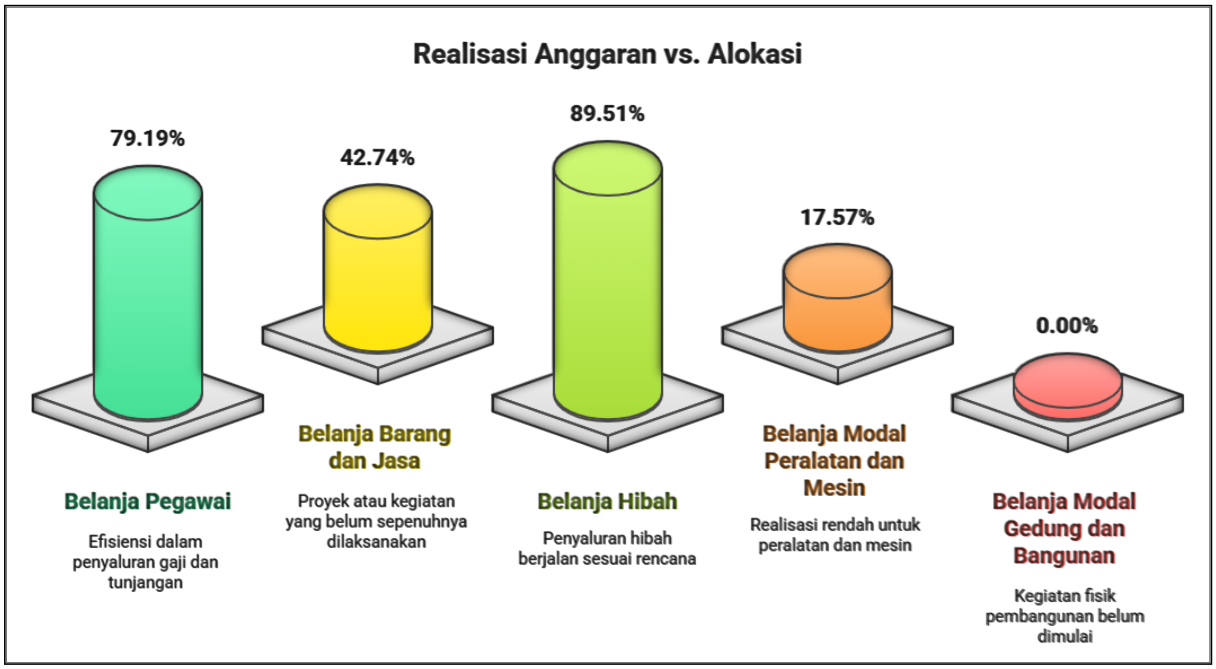
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Realisasi Rp98.438.285,00 dari anggaran Rp560.275.000,00 (17,57%).
   - Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Belum ada realisasi sama sekali (0,00%), mengindikasikan bahwa kegiatan fisik pembangunan gedung/bangunan belum dimulai atau belum memasuki tahap pencairan dana.

3. Surflus/Defisit

   Dengan total realisasi belanja sebesar Rp5.543.657.496,27 dari anggaran Rp8.778.536.310,00, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp3.234.878.813,73 (atau 36,85% dari total anggaran). Defisit ini merupakan konsekuensi logis dari realisasi yang belum mencapai 100%, dan bukan indikator negatif selama proses penyerapan anggaran masih berlangsung sesuai jadwal.

Tabel 2.4
LRA dan Belanja Daerah s/d Triwulan III (30 September)
Tahun 2025

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	% 2025	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	3.464.270.545,00	2.743.384.975,00	79,19	3.521.339.495,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.321.190.765,00	1.419.395.035,00	42,74	4.932.215.854,00
3	Belanja Hibah	1.432.800.000,00	1.282.439.201,27	89,51	36.998.993.128,46
4	Belanja Modal	560.275.000,00	98.438.285,00	17,57	396.470.926,00



2.4. ISU-ISU STRATEGIS YANG MENDASARI PERUBAHAN

Isu-isu strategis yang mendasari perubahan APBD Pemda Nunukan pada tahun anggaran 2025 antara lain berkaitan dengan penyesuaian anggaran akibat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan sebesar Rp211,44 miliar, dari Rp1,747 triliun menjadi Rp1,535 triliun. Penurunan ini berdampak pada struktur APBD yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu disesuaikan, dengan tetap memprioritaskan program-program strategis seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, penyediaan cadangan pangan, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, penyesuaian ini juga didasari oleh beberapa regulasi nasional termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, KMK Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian TKD, serta Surat Edaran Mendagri tentang efisiensi dan arahan pembangunan daerah sesuai visi misi kepala daerah terpilih. Instruksi Presiden menekankan pembatasan kegiatan seremonial, pengurangan honorarium, dan pengutamaan belanja langsung yang berdampak pada pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Nunukan pun menerbitkan beberapa peraturan pelaksana seperti Surat Edaran Bupati No. 79 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dan Perkada No. 307 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk mengakselerasi realisasi anggaran dan menjaga fokus pada sektor prioritas melalui efisiensi belanja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Secara garis besar, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan juga mengalami penurunan sekitar Rp104 miliar dari target awal Rp1,993 triliun menjadi Rp1,889 triliun. Penyesuaian ini juga mengakomodir program nasional seperti bantuan BPJS kesehatan untuk fakir miskin, akreditasi rumah sakit, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun 2025, serta subsidi ongkos angkut untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi dari alokasi bantuan keuangan provinsi.
Perubahan APBD Nunukan 2025 ini mencerminkan adaptasi daerah terhadap dinamika kebijakan nasional serta fokus pada pelayanan publik yang efektif dan efisien sesuai visi misi kepala daerah terpilih, dengan tetap menjaga kesinambungan perencanaan jangka menengah dan panjang melalui RPJPD dan RPJMD yang sedang dalam penyusunan dan penetapan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 disusun untuk mewujudkan sinergi antara visi dan misi Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol di lapangan. Dokumen ini bukan hanya menjadi pedoman teknis operasional, tetapi juga menjadi komitmen strategis dalam menjaga stabilitas ideologi, politik, sosial, dan keamanan di wilayah perbatasan yang dinamis dan multikultural.

Tujuan Renstra ini dirumuskan berdasarkan hasil telaah mendalam terhadap kondisi aktual pelayanan publik, tantangan struktural, isu-isu strategis, serta potensi daerah yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan regional — termasuk ancaman radikalisme, penyebaran hoaks lintas batas, rendahnya partisipasi politik substantif, serta lemahnya internalisasi nilai Pancasila — tujuan Renstra dirancang agar responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tujuan utama Renstra Bakesbangpol 2025–2029 adalah ***"Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM"***. Untuk mencapai hal tersebut, tujuan strategis dirancang secara hierarkis dan terukur, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta arahan kebijakan nasional di bidang pembinaan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan penguatan demokrasi.

Melalui penetapan tujuan yang jelas dan terarah, Bakesbangpol berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi kebangsaan yang kokoh, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta menciptakan sistem deteksi dini dan penanganan konflik yang efektif — khususnya di wilayah perbatasan yang rentan terhadap infiltrasi ideologi asing dan disintegrasi sosial.

Tujuan strategis Perangkat Daerah menjadi peta jalan bagi seluruh program, kegiatan, dan inisiatif Bakesbangpol selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan target pencapaian yang akuntabel dan transparan kepada publik.

Tujuan utama yang ditetapkan yakni Meningkatnya harmonisasi masyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, ini selaras dengan salah satu sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam misi 5, yaitu "Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi".

3.2. Sasaran

Meningkatnya harmonisasi masyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM sebagai tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis perangkat daerah yang digunakan sebagai arah dan panduan pencapaian tujuan strategis.

Berdasarkan uraian diatas, berikut merupakan uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Harmonisasi Masyarakat

   Indikator :

   - *Indeks Kerukunan Umat Beragama*: Target meningkat secara bertahap dari 76,47 (2025) menjadi 78,97 (2030).
   - *Indeks Demokrasi*: Naik dari 80,47 (2025) hingga 82,00 (2030), menunjukkan upaya memperkuat tata kelola demokrasi di tingkat masyarakat.

2. Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya,dan Keamanan.

   Indikator :

   - *Indeks Kewaspadaan Nasional*: Diharapkan naik dari 75,00 (2025) menjadi 83,00 (2030), menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terhadap stabilitas nasional.

3. Menguatnya Karakter Kebangsaan

   Beberapa indikator digunakan untuk mengukur penguatan karakter kebangsaan :

   - Angka Kesadaran Politik: Diupayakan mencapai 100% mulai tahun 2026 hingga 2030, menandakan bahwa seluruh masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik.
   - Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan dalam Pembangunan: Target 100% setiap tahun, menunjukkan peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa.
   - Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan: Target meningkat dari 80% (2025–2026) menjadi 85% (2027–2030), menunjukkan upaya peningkatan pemahaman nilai-nilai dasar negara.

4. Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah

   - Indikator : *SAKIP OPD* (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
   - Target capaian dimulai dari kategori B (baik) pada tahun 2025–2028, lalu meningkat ke kategori BB (baik sekali) pada tahun 2029–2030, menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah.

3.3. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk mencapai tujuan atau sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi yang dirumuskan seyogyanya mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Strategi dalam perencanaan adalah serangkaian tindakan dan pendekatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan sumber daya yang tersedia. Ini melibatkan pembuatan keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan merespons tantangan yang mungkin timbul. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menjadi dasar untuk menyusun rencana yang lebih rinci. Perencanaan strategis melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan cara untuk mencapainya, termasuk analisis lingkungan internal dan eksternal serta pengembangan tindakan yang tepat.

Strategi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan untuk memastikan dokumen tersebut selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Maka dari itu, dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya, dilakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats atau Analisis SWOT pada hasil telaah permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah dilakukan sebelumnya. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan prinsip komprehensivitas dan daya ungkit yang luas, suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu atau beberapa sasaran, dengan asumsi bahwa 1 strategi mampu mencapai sekurang-kurangnya 1 sasaran atau lebih. Dari sekian banyak alternatif strategi yang muncul dari hasil analisis SWOT serta mendasarkan pada permasalahan pelayanan OPD dan isu strategis maka dapat ditetapkan strategi Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan sebagi berikut :

Tabel 3.3 Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal	Demokrasi dan partisipasi dalam Politik	Menguatnya Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, demokrasi substansial dan partisipasi politik masyarakat untuk membangun identitas dan integritas bangsa	1. Meningkatkan peran Partai Politik dan partisipasi politik masyarakat 2. Menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 3. Meningkatkan kapasitas dan peran Organisasi Masyarakat
Internalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa			
Ketahaan sosial, ekonomi, budaya dan agama yang belum optimal	Intoleransi,Anarkisme,Radikalisme,Terorisme,dan KUB	Meningkatnya Stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan	Peningkatan kapasitas masyarakat terkait toleransi, kerukunan umat beragama, bahaya narkoba, kewaspdaaan dini potensi konflik sosial serta pencegahan penyebaran ajaran radikalisme dan ekstrimisme untuk mewujudkan stabilitas nasioanal di Daerah	1. Menguatkan Kelembagaan dan peran FKUB dalam mendorong terwujudnya toleransi, kerukunan dan moderasi beragama serta implementasi P4GN 2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik social dan optimalisasi koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi lintas sektor
Potensi terjadinya konflik sosial	Kewaspadaan Nasional di Daerah			
Akuntabilitas dan tata Kelola Perangkat Daerah belum optimal	Akuntabilitas dan Tata Kelola Administrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen perkantoran	Meningkatkan kinerja sekretariat Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran OPD

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025

4.1. Rencana Kerja OPD

Sejalan dengan dinamika pembangunan daerah, perkembangan situasi sosial-politik, serta arahan kebijakan dalam Kebijakan Umum Anggaran–Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai faktor, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I Tahun 2025, kebutuhan penanganan isu-isu strategis di wilayah perbatasan, serta kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka optimalisasi APBD.

Penyusunan Renja Perubahan ini juga mempertimbangkan capaian kinerja Tahun 2024, rekomendasi dari Forum Perangkat Daerah, serta arahan Bupati Nunukan dalam rangka penguatan stabilitas politik, persatuanG bangsa, dan ketahanan sosial di tengah kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan. Seluruh perubahan yang diusulkan tetap selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol 2020–2025, serta prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan rencana kerja ini mencakup penyesuaian alokasi anggaran, pergeseran fokus kegiatan, penambahan kegiatan responsif terhadap isu aktual, serta revisi target kinerja yang lebih realistis dan terukur. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan tetap relevan, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat ideologi Pancasila, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat di wilayah perbatasan.

4.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I Tahun 2025 serta arahan kebijakan dalam KUA-PPAS Perubahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pagu anggaran, pergeseran alokasi kegiatan, serta penambahan kegiatan strategis yang bersifat responsif terhadap dinamika sosial-politik terkini di wilayah perbatasan. Seluruh perubahan dirancang untuk memperkuat efektivitas pencapaian sasaran OPD, khususnya dalam menjaga stabilitas kebangsaan, mencegah konflik sosial, dan memperluas pembinaan ideologi Pancasila hingga ke wilayah terpencil. Berikut ini adalah Tabel Renja Perubahan 2025.

Tabel. 4.1
Rekap Rencana Kerja Perubahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun											
								Sebelum					Setelah				Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									Rp11.513.756.267,40	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.697.356.267,40	Rp8.218.261.310,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.778.536.310,00	(Rp2.918.819.957,40)	(33.25)	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				Rp11.513.756.267,40	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.697.356.267,40	Rp8.218.261.310,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.778.536.310,00	(Rp2.918.819.957,40)	(33.25)	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				Rp11.513.756.267,40	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.697.356.267,40	Rp8.218.261.310,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.778.536.310,00	(Rp2.918.819.957,40)	(33.25)	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp6.992.643.592,40	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.176.243.592,40	Rp3.954.410.075,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.514.685.075,00	(Rp2.661.558.517,40)	(58.95)	
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp13.406.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.406.210,00	Rp1.530.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.150,00	(Rp11.876.060,00)	(776.14)	
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp10.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp10.202.000,00)	(Infinity)	
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp3.204.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.204.210,00	Rp1.530.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.150,00	(Rp1.674.060,00)	(109.40)	
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp6.538.839.372,40	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.538.839.372,40	Rp3.490.790.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.490.790.545,00	(Rp3.048.048.827,40)	(87.32)	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan; Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.538.839.372,40	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.538.839.372,40	Rp3.490.790.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.490.790.545,00	(Rp3.048.048.827,40)	(87.32)	
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp139.817.210,00	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.417.210,00	Rp178.776.470,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp739.051.470,00	Rp415.634.260,00	56.24	
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp1.584.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.584.000,00	Rp1.584.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.584.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan; Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp183.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.600.000,00	Rp84.200.000,00	Rp560.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp644.475.000,00	Rp460.875.000,00	71.51	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp26.430.210,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.430.210,00	Rp16.174.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.174.920,00	(Rp10.255.290,00)	(63.40)	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp12.072.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.072.000,00	Rp8.960.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.960.550,00	(Rp3.111.450,00)	(34.72)	
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp99.731.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.731.000,00	Rp67.857.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.857.000,00	(Rp31.874.000,00)	(46.97)	
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp251.141.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.141.200,00	Rp247.641.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.641.200,00	(Rp3.500.000,00)	(1.41)	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan; Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp78.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.942.000,00	Rp78.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.942.000,00	Rp0,00	0.00	
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp171.699.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.699.200,00	Rp168.199.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.199.200,00	(Rp3.500.000,00)	(2.08)	
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp49.439.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.439.600,00	Rp35.671.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.671.710,00	(Rp13.767.890,00)	(38.60)	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan; Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.089.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.089.600,00	Rp30.671.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.671.710,00	(Rp11.417.890,00)	(37.23)	
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan		Rp7.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.350.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	(Rp2.350.000,00)	(47.00)	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				Rp998.702.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp998.702.590,00	Rp867.110.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp867.110.900,00	(Rp131.591.690,00)	(15.18)	
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				Rp998.702.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp998.702.590,00	Rp867.110.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp867.110.900,00	(Rp131.591.690,00)	(15.18)	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Dana Bagi	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua		Rp164.608.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.608.060,00	Rp149.385.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.385.520,00	(Rp15.222.540,00)	(10.19)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
					Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Hasil (DBH)	Kelurahan/Desa														
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp834.094.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp834.094.530,00	Rp717.725.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.725.380,00	(Rp116.369.150,00)	(16.21)	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				Rp1.395.222.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.395.222.040,00	Rp1.510.050.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.050.690,00	Rp114.828.650,00	7.60	
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**				Rp1.395.222.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.395.222.040,00	Rp1.510.050.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.050.690,00	Rp114.828.650,00	7.60	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.395.222.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.395.222.040,00	Rp1.510.050.690,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.050.690,00	Rp114.828.650,00	7.60	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				Rp174.734.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.734.550,00	Rp150.517.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.517.510,00	(Rp24.217.040,00)	(16.09)	
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				Rp174.734.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.734.550,00	Rp150.517.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.517.510,00	(Rp24.217.040,00)	(16.09)	
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan/Desa		Rp174.734.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.734.550,00	Rp150.517.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.517.510,00	(Rp24.217.040,00)	(16.09)	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				Rp389.137.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.137.405,00	Rp802.871.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.871.765,00	Rp413.734.360,00	51.53	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**				Rp389.137.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.137.405,00	Rp802.871.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.871.765,00	Rp413.734.360,00	51.53	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kelurahan/Desa		Rp389.137.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp389.137.405,00	Rp802.871.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp802.871.765,00	Rp413.734.360,00	51.53	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				Rp1.563.316.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.316.090,00	Rp933.300.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.300.370,00	(Rp630.015.720,00)	(67.50)	
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**				Rp1.563.316.090,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.316.090,00	Rp933.300.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.300.370,00	(Rp630.015.720,00)	(67.50)	
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.737.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.737.610,00	Rp64.086.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.086.220,00	(Rp85.651.390,00)	(133.65)	
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp314.317.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.317.500,00	Rp199.038.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.038.630,00	(Rp115.278.870,00)	(57.92)	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.099.260.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.260.980,00	Rp670.175.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp670.175.520,00	(Rp429.085.460,00)	(64.03)	

4.3. Penambahan/Pengurangan/Hapus Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan kegiatan semester I Tahun 2025 serta arahan kebijakan dalam KUA-PPAS Perubahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian pagu anggaran, pergeseran alokasi kegiatan, serta penambahan kegiatan strategis yang bersifat responsif terhadap dinamika sosial-politik terkini di wilayah perbatasan. Seluruh perubahan dirancang untuk memperkuat efektivitas pencapaian sasaran OPD, khususnya dalam menjaga stabilitas kebangsaan, mencegah konflik sosial, dan memperluas pembinaan ideologi Pancasila hingga ke wilayah terpencil. Berikut ini adalah Tabel Renja Perubahan 2025.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Kegiatan ini dihapus karena efisiensi anggaran, anggaran awalnya sebesar Rp. 10.202.000,00 dan pada saat perubahan menjadi Rp. 0,-, adapun untuk target juga 0 Dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 3.204.210,00 menjadi Rp. 1.530.150,00 atau sebesar 52,25% adapun untuk target tetap yaitu 5 Dokumen

c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Kegiatan ini mengalami penguarangan anggaran dari Rp. 6.538.839.372,40 menjadi Rp. 3.490.790.545,00 atau sebesar 46,61%

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran dari Rp183.600.000,00 menjadi Rp. 644.475.000,00 atau naik menjadi 251.02% hal ini dikarenakan penambahan belanja modal terkait Mobil Bus, adapun untuk target tetap 5 paket

e. Bahan Logistik Kantor
   Kegiatan ini mengalami penguarangan anggaran dari Rp. 26.430.210,00 menjadi Rp. 16.174.920,00 atau sebesar 38,79%, sedangkan untuk target tetap yaitu 5 paket

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   Kegiatan ini mengalami penguarangan anggaran dari Rp. 12.072.000,00 menjadi Rp. 8.960.550,00 atau sebesar 25,77%, sedangkan untuk target tetap yaitu 2 paket

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 99.731.000,00 menjadi Rp. 67.857.000,00 atau sebesar 31,97%. Sedangkan untuk target tetap yaitu 2 Laporan

h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 171.699.200,00 menjadi Rp. 168.199.200,00 atau sebsar 2,04%. Sedangkan untuk target tetap yaitu 13 Laporan

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 42.089.600,00 menjadi Rp. 30.671.710,00 atau sebesar 27.21%. Sedangkan untuk target tetap yaitu 4 unit

j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 7.350.000,00 menjadi Rp. 5.000.000,00 atau sebesar 31,97%, adapun targetnya tetap yaitu 13 unit

k. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 164.608.060,00 menjadi Rp. 149.385.520,00 atau sebesar 9,22%. Sedangkan untuk target tetap yaitu 390 orang

l. Pembentukan Paskibraka

Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 834.094.530,00 menjadi Rp. 717.725.380,00 atau sebesar 13,95%. Sedangkan untuk target tetap yaitu 43 orang

m. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran dari Rp. 1.395.222.040,00 menjadi Rp 1.510.050.690,00 atau sebesar 8,23% hal ini terkait kenaikan Bankeu Parpol, sedangkan untuk targetnya tidak berubah yaitu 100 orang

n. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Kegiatan ini mengalami penguarangan anggaran dari Rp. 174.734.550,00 menjadi Rp. 150.517.510,00 atau sebesar 13,83%, sedangkan untuk targetnya tetap yaitu 100 orang

o. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Kegiatan ini mengalami penambahan anggaran dari Rp. 389.137.405,00 menjadi Rp. 802.871.765,00 atau sebesar 106,31% hal ini dikarenakan terdapa bantuan hibah berubah mobil ambulan (jenazah) untuk FKUB, sedangkan untuk targetnya tetap yaitu 100 orang

p. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Kegaitan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 149.737.610,00 menjadi Rp. 64.086.220,00 atau sebesar 57,22%, sedangkan untuk targetnya tidak berubah yaitu 2 dokumen

q. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

   Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 314.317.500,00 menjadi Rp. 199.038.630,00 atau sebesar 36,67%, sedangkan untuk targetnya tetap yaitu 30 orang

r. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 1.099.260.980,00 menjadi Rp. 670.175.520,00 atau sebesar 39.00%, sedangkan untuk targetnya tetap yaitu 3 dokumen

   Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Perubahan Rencana Kerja dibawah ini :

Tabel 4.2
Perubahan Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu**				**12 Bulan**	**12 Bulan**	**7.022.970.014,00**	**7.176.243.592,40**	**3.750.566.692,00**	**121.590.400,40**							**7.144.560.414,40**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	23.644.360,00	13.406.210,00	1.530.150,00	-22.114.210,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		24.144.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	10.202.000,00	0,00	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			13.590.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	3.204.210,00	1.530.150,00	1.530.150,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			10.554.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.521.882.214,00	6.538.839.372,40	3.171.091.722,00	-3.350.790.492,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		6.521.882.214,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	25 Orang/bulan	0,00	6.538.839.372,40	3.171.091.722,00	3.171.091.722,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			6.521.882.214,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	223.317.640,00	323.417.210,00	291.131.910,00	67.814.270,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		294.590.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			1.992.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	10.242.350,00	183.600.000,00	212.975.000,00	202.732.650,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			3.468.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	0,00	26.430.210,00	12.675.360,00	12.675.360,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			28.330.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.379.670,00	12.072.000,00	8.960.550,00	-8.419.120,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			10.799.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	157.304.000,00	99.731.000,00	54.937.000,00	-102.367.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.405.200,00	251.141.200,00	251.141.200,00	52.736.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		221.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	78.942.000,00	78.942.000,00	78.942.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			83.545.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	13 Laporan	0,00	171.699.200,00	171.699.200,00	171.699.200,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			137.136.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.720.600,00	49.439.600,00	35.671.710,00	-20.048.890,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		82.062.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4 Unit	0,00	42.089.600,00	30.671.710,00	30.671.710,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			41.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**-2.633.992.235,00**							**23.231.550.952,40**	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	12.850.000,00	7.350.000,00	5.000.000,00	-7.850.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			41.031.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGGSAAN**	**Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara**				**'0,00067 Persen**	**'0,00067 Persen**	**899.838.830,00**	**998.702.590,00**	**832.430.090,00**	**1.065.624.560,00**							**1.965.463.390,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	899.838.830,00	998.702.590,00	832.430.090,00	-67.408.740,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tokoh, Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa		1.965.463.390,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	390 Orang	215.941.700,00	164.608.060,00	109.657.410,00	-106.284.290,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			895.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				54 Orang	43 Orang	683.897.130,00	834.094.530,00	722.772.680,00	38.875.550,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			1.070.463.390,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula**				**0,34 Persen**	**0,34 Persen**	**1.199.999.878,00**	**1.395.222.040,00**	**1.194.937.200,00**	**9.131.189.869,00**							**10.331.189.747,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.199.999.878,00	1.395.222.040,00	1.194.937.200,00	-5.062.678,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tokoh, Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa		10.331.189.747,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	100 Orang	1.199.999.878,00	1.395.222.040,00	1.194.937.200,00	-5.062.678,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			10.331.189.747,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**49.999.565,00**	**174.734.550,00**	**150.076.030,00**	**100.000.435,00**							**150.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	49.999.565,00	174.734.550,00	150.076.030,00	100.076.465,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Ormas, OKP, Yayasan dan Perkumpulan		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	100 Orang	49.999.565,00	174.734.550,00	150.076.030,00	100.076.465,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya**				**0,89 Persen**	**0,89 Persen**	**450.006.640,00**	**389.137.405,00**	**315.872.525,00**	**211.056.480,00**							**661.063.120,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	450.006.640,00	389.137.405,00	315.872.525,00	-134.134.115,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tokoh, Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa		661.063.120,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	100 Orang	450.006.640,00	389.137.405,00	315.872.525,00	-134.134.115,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			661.063.120,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI**				**71,43 Persen**	**71,43 Persen**	**200.000.215,00**	**1.563.316.090,00**	**944.940.370,00**	**2.779.274.066,00**							**2.979.274.281,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	200.000.215,00	1.563.316.090,00	944.940.370,00	744.940.155,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tokoh, Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa		2.979.274.281,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.255,00	149.737.610,00	75.726.220,00	25.725.965,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			993.091.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	314.317.500,00	199.038.630,00	149.038.630,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			993.091.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	99.999.960,00	1.099.260.980,00	670.175.520,00	570.175.560,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			993.091.427,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**9.822.815.142,00**	**11.697.356.267,40**	**7.188.822.907,00**	**460.124.998.811,20**							**23.231.550.952,40**	

BAB V
P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester I Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja Tahun 2024, serta dinamika kebijakan daerah dan nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan telah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan prioritas pembangunan, mengoptimalkan alokasi anggaran, serta merespons isu-isu strategis yang berkembang di wilayah perbatasan, seperti potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, radikalisme, serta kebutuhan penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi yang sehat.

Perubahan Renja mencakup penyesuaian pagu anggaran, pengalihan dana dari kegiatan kurang prioritas ke kegiatan strategis, serta penambahan kegiatan responsif seperti pengadaan mobil ambulans jenazah untuk FKUB dan peningkatan bantuan keuangan partai politik. Meskipun terjadi efisiensi pada sejumlah kegiatan administratif dan operasional, seluruh perubahan tetap mempertahankan target kinerja yang telah ditetapkan, menunjukkan komitmen OPD dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Secara keseluruhan, Renja Perubahan Tahun 2025 tetap selaras dengan RKPD Perubahan Kabupaten Nunukan Tahun 2025, Renstra Badan Kesbangpol 2025–2029, serta arahan kebijakan nasional terkait penguatan moderasi beragama, stabilitas politik, dan ketahanan sosial di daerah perbatasan.

5.2. REKOMENDASI

Untuk memastikan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 berjalan optimal dan mencapai sasaran yang ditetapkan, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinas iLintas Sektor
   Memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, KPU, Bawaslu, FKPT, FPK, serta instansi vertikal dalam penanganan isu kebangsaan, khususnya di wilayah kepulauan dan perbatasan.

2. Percepatan Realisasi Kegiatan Strategis
   Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang mengalami penambahan anggaran (seperti pembinaan kerukunan umat beragama dan pendidikan politik) agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara maksimal sebelum akhir tahun anggaran.
3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
   Meningkatkan frekuensi dan kualitas monitoring pelaksanaan kegiatan, terutama yang berbasis di wilayah terpencil, guna memastikan capaian fisik dan keuangan berjalan paralel.

4. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi
   Memanfaatkan platform digital untuk sosialisasi ideologi Pancasila, deteksi dini konflik sosial, dan penyebaran informasi kebangsaan yang akurat, khususnya di kalangan generasi muda.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
   Menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.